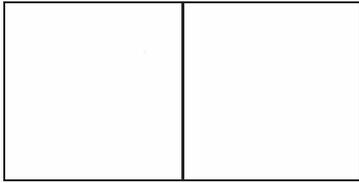


BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



3.1 Sekilas mengenai Bisnis LPG di Indonesia

Dalam 4 tahun terakhir ini, bisnis LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yang biasa dikenal dengan sebutan “elpiji”, mengalami perubahan yang cukup drastis dalam hal pemanfaatannya di dalam negeri. Selama ini dari konsumsi sekitar 150.000 Metrik Ton (MT) per bulan pada tahun 2006, dengan pemanfaatan sebagai berikut; 69 % untuk sektor rumah tangga, 18 % untuk industri dan hanya 13 % untuk hotel berbintang dan restoran. Namun kondisi tersebut sekarang telah berubah. Pemanfaatan LPG menjadi diperluas hingga ke pembangkit – pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN. Yang menjadi pertanyaan, apakah LPG yang dipakai di dapur – dapur itu adalah sama dengan LPG yang juga digunakan di pembangkit listrik ? Jawabannya tentu saja berbeda. LPG yang diproduksi di Indonesia pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis *refrigerated* dan *press rise*. Yang digunakan oleh konsumen rumah tangga yaitu yang dipakai di dapur atau di tabung adalah jenis yang disebut *press rise*. Sedangkan yang biasa di pakai oleh pembangkit listrik adalah jenis *refrigerated*.

Selama ini, PT. Pertamina (Persero) adalah pemain satu – satunya di bisnis LPG. Seiring dengan berkembangnya zaman maka keran untuk bisnis LPG mulai di buka kepada pemain lain (baik itu swasta maupun BUMN lainnya). Kendala bagi pihak swasta selama ini untuk memasuki bisnis LPG adalah mengenai masalah harga jual yang rendah. Sebelumnya PT. Pertamina (Persero) terpaksa masih memberlakukan harga LPG di bawah harga internasional di karenakan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang membolehkan pihak swasta bermain di sektor ini, ditambah dengan adanya program pemerintah mengenai

konversi energi dari minyak tanah menjadi gas, maka investor - investor baru mulai bermunculan. Seperti yang telah disebutkan pada awal Bab I, gagasan mengkonversi minyak tanah ke gas itu sangat ideal, apalagi kondisi sekarang dimana harga minyak mentah dunia sudah pernah menyentuh harga USD 145 per barrelnya. Karenanya, konsistensi program ini harus dipertahankan, agar target tercapai. Program ini harus berkelanjutan dengan intensitas sosialisasi yang harus ditingkatkan. Pendekatan kepada kelompok masyarakat yang menjadi target perlu diperbaiki dan dibenahi, dan yang paling penting adalah menghilangkan kesan pemaksaan. Keberhasilan program ini membutuhkan waktu dan toleransi. Berarti, pengurangan/penghentian pasokan minyak tanah ke kelompok masyarakat yang menjadi target harus dipertimbangkan lagi. Mereka yang saat ini menggunakan haknya untuk memprotes program konversi layak diberi toleransi. Pada masa tenggang toleransi ini mereka diberi pemahaman intensif sehingga bisa mengadopsi program ini. Tapi tentunya toleransi itu sendiri harus memiliki batas waktu (*time frame*).

Mengapa toleransi perlu diberikan? Karena tak semua kelompok masyarakat bisa langsung beradaptasi dengan program konversi itu. Bukan karena menolak, tetapi lebih karena alasan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, banyak keluarga yang terbiasa setiap hari hanya menyisihkan beberapa rupiah untuk membeli, katakanlah, setengah liter minyak tanah untuk memasak hari itu saja. Besok beli lagi setengah liter. Ketika program diperkenalkan, mereka sudah khawatir tak mampu membeli sekaligus satu tabung gas paling kecil (3 kg) sekalipun. Alasan-alasan seperti ini yang mestinya ditanggapi oleh para pelaksana program konversi.

Kendala – kendala Dalam Konversi

Konversi pemakaian minyak tanah ke LPG bagi sebagian rakyat kecil dirasakan akan menimbulkan banyak masalah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, dari aspek fisik, minyak tanah bersifat cair sehingga transportasi dan pengemasannya mudah, disamping penjualan dengan sistem eceranpun menjadi mudah. Kondisi ini akan memudahkan rakyat kecil yang ingin membeli minyak tanah, contoh sederhana, masyarakat kecil dapat membeli minyak tanah

sebanyak 0,5 liter (katakanlah Rp 1.500 dengan harga subsidi) dan membawanya sendiri dengan mudah. Minyak tanah 0,5 liter bisa dimasukkan ke plastik, kondisi ini tak mungkin bisa dilakukan untuk pembelian LPG, karena LPG dijual per tabung, tabung paling kecil berisi 3 kg dengan harga Rp 14.500-15.000. Masyarakat kecil jelas tidak mungkin bisa membeli LPG hanya 0,5 kg, lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas. Kedua, dari aspek kimiawi, LPG jauh lebih mudah terbakar (*inflammable*) dibanding minyak tanah. Melihat perbedaan sifat fisika dan kimia (minyak tanah dan LPG) tersebut, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektifitas dan kemanan kebijakan konversi tersebut.

Pengurangan/penghentian suplai minyak tanah akan menimbulkan perubahan di masyarakat. Hal ini disebabkan tingkat penerimaan dan kemampuan beradaptasi dari masyarakat yang berbeda-beda terhadap perubahan dari minyak tanah ke LPG serta kemampuan yang berbeda-beda dari mitra distribusi minyak tanah dan agen LPG yang ada dalam menyalurkan LPG ke masyarakat. Kondisi ini sering kali mengakibatkan pasokan LPG menjadi kurang lancar dan menyebabkan banyak warga yang tidak bisa membeli LPG pada saat tabung gasnya kosong/ habis.

Kondisi yang sering terjadi sekarang adalah LPG masih sulit ditemukan di daerah - daerah dimana pemerintah telah melakukan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke LPG. Pada saat program konversi dijalankan, kelangkaan minyak tanah terjadi di berbagai daerah, ini menyebabkan harga minyak tanah melonjak mencapai Rp. 4.500 - 5.000 per liter ditingkat pengecer, berarti dua kali lipat dari harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Banyak pihak menilai program ini, dirasakan terburu-buru karena rakyat miskin belum siap melaksanakan kebijakan konversi tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Hendri Edianto (direktur riset Energi Riset dan Manajemen Indonesia, 2007) dalam hal kebijakan konversi energi minyak tanah bersubsidi ke LPG, ternyata pemerintah mendapatkan keuntungan berupa pengurangan subsidi yang harus dikeluarkan, hal ini dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perhitungan konversi energi



Sumber: Hendri Edianto (direktur riset Energi Riset dan Manajemen Indonesia, 2007)

Selisih subsidi sebesar Rp. 20,12 triliun per tahun (asumsi seluruh minyak tanah dikonversi oleh LPG), akhirnya membuat pemerintah mengambil kebijakan konversi energi minyak tanah ke LPG. Dari sisi masyarakat, penggunaan LPG untuk mengganti minyak tanah akan menghemat biaya Rp. 20 ribu sampai dengan Rp. 25 ribu per bulan. Angka ini dihitung dari kebutuhan rata-rata minyak tanah rumah tangga 20 liter per bulan yang mampu dikonversi oleh 2,5 LPG 3kg. Artinya masyarakat juga akan diuntungkan dengan adanya program konversi minyak tanah ke LPG.

Sekilas mengenai bisnis LPG, LPG dapat dihasilkan dari kilang Unit Pengolahan (UP) Direktorat Hilir Pertamina atau kilang swasta, yaitu pihak swasta yang bekerjasama dengan Daerah Operasi Hulu (DOH) Direktorat Hulu Pertamina. LPG juga salah satunya dihasilkan dari gas bumi yang dihasilkan lapangan Attaka (Kalimantan Timur) dan lapangan Ardjuna (laut Jawa).

Dengan meningkatnya konsumsi bahan bakar serta munculnya teknologi yang lebih canggih, LPG telah dihasilkan bukan saja oleh kilang minyak tetapi juga oleh kilang LPG. Kilang LPG tersebut dibangun di beberapa lapangan minyak antara lain di lapangan Rantau (Aceh), Tuga Barat dan Mundu (Jawa Barat), Arar (Irian Jaya), lepas pantai laut Jawa (di daerah kerja ARCO), Palembang (Sumatera bagian selatan) dan di Tanjung Santan (Kalimantan Timur, dioperasikan oleh Union Oil).

Produksi LPG nasional total tahun 2007 adalah sebanyak 1.100 ribu ton. Perinciannya adalah sebagai berikut; produksi yang dihasilkan oleh kilang Pertamina sendiri sebanyak 850 ribu ton, kilang swasta (KKKS-Kontraktor kontrak kerja sama migas) sebanyak 200 ribu ton, sisanya sebanyak 50 ribu ton diimpor dari luar negeri. Sedangkan untuk prediksi konsumsi nasional periode 2008 adalah 1.251 (diluar tabung 3 kg). Dengan perincian sebagai berikut; konsumsi untuk tabung 12 kg sebanyak 962 ribu ton, tabung 50 kg sebanyak 139 ribu ton dan bentuk curah (*bulk*) sebanyak 150 ribu ton. Sedangkan untuk tabung 3 kg di perkirakan bisa mencapai 1.200 ribu ton (Pertamina-Bisnis Indonesia, 1 Juli 2008). Adanya kesempatan dengan terbukanya bisnis ini dan juga untuk membantu mensukseskan program pemerintah mengenai konversi energi serta tentunya juga mencari profit yang layak sebagai sebuah perusahaan, maka PT. X telah menyelesaikan pembangunan LPG Plant di Palembang kira – kira pertengahan tahun 2007 yang lalu. Pabrik pengolahan LPG ini mempunyai produk akhir berupa LPG dimana 100 % dijual kepada Pertamina, serta Kondensat & Propan yang dijual kepada para agen Pertamina.

3.2 Sekilas tentang PT. X

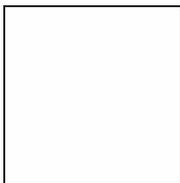
PT. X adalah perusahaan PMA swasta yang bergerak di bidang pengolahan/ ekstraksi gas alam mentah untuk mendapatkan produk Propan, LPG campuran (*Mix*) dan Kondensat secara maksimal dan berkualitas tinggi serta ramah lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Secara entitas legal, PT. X didirikan pada tahun 2006 awal. dan telah memulai operasi atas aktivitas pengolahan gas pada pertengahan tahun 2007.

Secara umum, Pabrik pengolahan PT. X yang berlokasi di Palembang (Sumatera Selatan) bertujuan untuk berusaha dibidang usaha industri pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi produk turunannya terutama LPG, Kondensat dan Propan serta melakukan pembangunan kilang pengolahan gas alam tersebut. Selain memproduksi, PT. X juga menjalankan usaha – usaha dibidang distribusi dan perdagangan gas LPG, Kondensat dan Propan yang meliputi impor dan ekspor, antar pulau/ daerah serta lokal.

Pabrik yang memiliki luas sekitar 2.66 ha ini memiliki SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH No. 00746/1,824,51. Dan Izin usaha Pengolahan Sementara dari DIRJEN MIGAS: NO 2969/24/DJM.0/2007, serta Perjanjian Jual beli Gas antara ANTARA PERTAMINA DENGAN PT X: NO 063/C00000/2005-SI & NO D0045/OBP-DIR/PJBG/I/05.

Teknologi yang digunakan PT. X berasal dari Kanada, yaitu Presson Enerflex. Perusahaan EPC (*Engineering, Procurement and Contraction*) yang melakukan pembangunan kilang tersebut adalah PT. Rekayasa Industri (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN. Pabrik yang memiliki kapasitas terpasang untuk produk LPG sebesar 120 TPD (*Ton per day*), Kondensat 250 Barrel/ hari dan Propan 10 TPD (*Ton per day*), mendapatkan pasokan aliran gas dari Lembak atau pun Cambai dengan pencapaian 60 MMSCFD dan tekanan 450 PSIG.

Pada tahap awal, sesuai *master plan* yang dibuat oleh manajemen PT. X, direncanakan bahwa 70 % produksi gas LPG akan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan sisanya 30 % direncanakan akan di ekspor. Tapi setelah melewati proses negosiasi dengan pihak Pertamina dimana pertimbangannya adalah pemerintah sangat membutuhkan LPG untuk alokasi konversi energi, serta juga ditambah kelangkaan LPG yang terjadi di dalam negeri, disetujui bahwa 100 % LPG hasil produksi PT. X akan di gunakan sepenuhnya untuk kebutuhan dalam negeri dimana PERTAMINA akan berperan sebagai pembeli (*buyer*) dengan membeli gas LPG dari PT X.



Gambar 3.1 Peta lokasi PT. X di Sumatera Selatan

Sumber: Departemen HRD PT. X

3.2.1 Departemen *Purchasing* dan Logistik PT. X

Dikarenakan organisasi ini masih terbilang baru, maka Struktur Organisasi PT. X bisa dibbilang masih sangat ringkas dan sederhana. Organisasi terbagi

menjadi dua, yaitu HO (*Head Office*) yang berlokasi di Jakarta dan Site (pabrik di Palembang). Plant Manager merupakan posisi tertinggi di Plant, dimana langsung bertanggung jawab kepada General Manager di Kantor Pusat. Plant Manager membawahi langsung dua fungsi utama, yaitu Divisi Komersial dan Divisi Produksi. Departemen *Purchasing* dan Logistik secara struktural berada di bawah koordinasi Divisi Komersial. Departemen ini memiliki 2 orang staf yang berfungsi sebagai *Buyer* dan tenaga administrasi. Departemen lainnya yang terkait erat adalah Departemen Warehousing yang dipimpin oleh *Warehouse Officer*. Selain dua fungsi diatas, Plant Manager juga membawahi secara langsung Departemen HRD, Engineering dan Security. Struktur organisasi PT. X dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. X

Sumber: Departemen HRD PT. X

Organisasi kantor pusat (*Head Office*) terhubung dengan *Plant* Palembang melalui Plant Manager yang ada di Palembang. Lampiran 7 adalah struktur organisasi di plant secara garis besar.

3.2.2 Proses produksi dan pengolahan Gas alam menjadi produk LPG

Secara umum, proses pengolahan Plant LPG PT. X dimulai dari bahan mentah (*Raw Material*) yang berupa Gas alam atau *Feed Gas* yang berasal dari sumur gas lembak. Aliran gas yang dimiliki oleh PERTAMINA ini kemudian didistribusikan melewati pipa menuju ke arah Plant PT X. Ada tiga tahapan penting yang kemudian terjadi setelah proses awal ini. Yaitu Dehidrasi, Refrigasi dan Fraksinasi. Dehidrasi adalah proses pemisahan gas dengan air. Agar kadar gasnya dapat tetap terjaga tinggi, maka kandungan air yang ada harus benar – benar dipisahkan. Kemudian masuk ke proses Refrigasi yaitu pendinginan terhadap aliran gas setelah melewati proses Dehidrasi. Dan yang terakhir adalah

Fraaksinasi, yaitu pemisahan fraksi – fraksi berat dan ringan menjadi produk LPG, Kondensat dan Propan. Hasil dari *Feed gas* yang tidak dipakai disebut *Lean Gas*, dimana gas tersebut akan dikirim kembali menuju ke PERTAMINA untuk berikutnya akan didistribusikan kepada PUSRI (Pupuk Sriwijaya) dan PLN (Perusahaan Listrik Negara). Proses produksi secara garis besar dapat dilihat di Lampiran 2.

